

Menakar Kekuasaan Raja

Oleh : Heri Priyatmoko

KURSI kekuasaan Kadipaten Paku Alaman, Yogyakarta tidak lagi melompong. Paku Alam X resmi menahkodai "anak bontot" wangsa Mataram Islam itu. Walau berstatus kadipaten dan kalah megah dengan Kasultanan, para kawula tempo doeloe tetap menganggap Paku Alam sebagai "raja" dan punya kekuasaan.

Lembaran sejarah mencatat, mereka yang bertakhta di kerajaan Mataram Islam memiliki kekuasaan yang tidak seupil. Dengan kekuasaan yang tidak terbatas, kawula dalem mengakui raja merupakan pemilik tanah berikut seluruh benda yang di atasnya, termasuk manusia. Sebab itulah, raja leluasa bertindak sekehendaknya, dan rakyat kudu patuh.

Pakar sejarah Jawa, G. Moedjanto (1987) menjelaskan, kekuasaan raja yang besar ditandai dengan beberapa unsur: [1] luas wilayah kerajaannya; [2] jembarnya daerah atau kerajaan taklukan dan berbagai barang persembahan yang disodorkan para raja taklukan; [3] kesetiaan para bupati dan punggawa dalam menunaikan tugas kerajaan dan kehadiran mereka dalam paseban yang di hari-hari tertentu; [4] kebesaran dan kemeriahan upacara kerajaan dan banyaknya pusaka dan perlengkapan upacara yang nampak dalam acara itu; [5] kekayaan, gelar yang disandang dan kemahsyurannya; [6] seluruh kekuasaan menjadi satu di tangannya, tanpa ada yang menyamai dan menandingi; [7] besarnya tentara dengan segala jenis dan perlengkapannya.

Untuk unsur yang disebut terakhir, sejarawan Peter Carey (2011) menyediakannya contoh menarik. Tahun 1808, Hamengku Buwono II punya sekitar 16 resimen keraton dengan kekuatan 1.765 prajurit, 976 di antaranya menyangand bedil dan tombak. Sebagian besar prajurit menunggang kuda, dan dilengkapi senjata tradisional Jawa seperti tombak dan keris yang batangnya dilapisi meteor. Barisan prajurit itu tidak hanya laki-laki, tetapi juga perempuan yang dinamakan Srikandi. Adapun prajurit yang bernama keparak estri yang berasal dari perempuan pejabat tinggi atau keluarga lapisan atas di pedesaan. Kenyataan ini menjadi nilai lebih bagi raja yang berkuasa.

Dalam dunia kekuasaan Jawa, dikenal konsep gungbinatara yang diterapkan para raja Mataram. Raja disebut baik manakala mampu menjalankan kekuasaannya secara seimbang antara kewenangan dengan kewajiban yang sama-sama besar. Bukan hanya itu, raja dengan kekuasaan yang absolut, punya kewajiban moral kesejahteraan rakyatnya. Soemarsoed Moertono (1985) menerangkan konsep kawula-gusti untuk mengikat hubungan antara raja (gusti) dengan rakyat (kawula). Dalam kehidupan tradisional Jawa, relasi kawula-gusti memiliki sifat pribadi, saling akrab, saling hormat, dan bertanggungjawab. Pemikiran Jawa memaknai konsep tersebut dengan kepercayaan yang tidak tergoyahkan akan nasib, segalanya telah ditakdirkan, yang disuratkan dalam istilah pinesti (ditentukan), tinitah (ditakdirkan), atau meminjam

kata dari bahasa Arab: takdir.

Posisi raja makin diakui ketika ia mampu menghadirkan bukti kesinambungan suatu kekuasaan. Karena itu, tidak jarang raja membikin silsilah keluarga atau genealogi dalam kerangka pembinaan kekuasaan. Untuk mewujudkan kepentingan tersebut, raja menugasi pujangga keraton yang membuat bagan silsilah kerajaan. Setelah itu, silsilah diterbitkan dan diumumkan lewat karya sastra berupa babad. Perangkat lain untuk mengumpulkan dan memusatkan kekuasaan di tangan raja, yaitu membuat angger-angger (undang-undang) sebagai dasar pijakan petinggi istana mengadili rakyat yang berbuat tidak sesuai norma atau mengganggu ketertiban dan keamanan kerajaan. Dalam hal ini, raja sebagai sumber hukum.

Kemudian, kekuasaan raja ditinjau pula dari benda pusaka yang menunjangnya. Lazimnya, pusaka yang tersimpan di keraton diyakini punya kekuatan gaib yang mendukung seorang raja. Penguasa kerajaan sengaja mengumpulkan pusaka sebagai sumber keselamatan dan sumber kas-ekten (kesaktian). Dalam menjalankan birokrasi pemerintahan dan menegakkan kekuasaan yang penuh resiko, raja memerlukan pusaka sebanyak mungkin. Kian sakti dengan topangan banyaknya pusaka, berarti makin aman dirinya dan modal mengguguli orang lain. Hal tersebut masuk akal karena orang Jawa sering memandang pusaka sebagai sifat kendel (sarana menebalkan tekad), sarana untuk menjadi orang pemberani. Wajar bila setiap pejabat

atau penguasa selalu punya pusaka dan berusaha menambah jumlah pusaka.

Keris merupakan pusaka yang paling dominan dalam tradisi Jawa. Selain melambangkan senjata kebesaran, ia menggambarkan konsep kawula-gusti bahwa keris mempunyai makna sebagai sarung dan mata. Sarung adalah personifikasi dari rakyat, sedangkan mata diibaratkan sebagai raja. Dilihat dari hubungan itu, kawula-gusti memiliki hubungan yang absolut. Selain keris, ada tombak dan gamelan Nyai Sekati. Masjid Demak dan pusara Sunan Kalijaga dianggap pula sebagai pusaka. Tidak hanya benda sebagai sumber kekuatan gaib, namun orang tuna rungu, cebol (orang katai), orang buta, dan orang difabel dipercayai menghadirkan kekuatan. Mereka senantiasa dekat raja, dengan istilah adoh watu cedhak ratu.

Paparan di atas menarik direfleksikan bahwa kasus perlengkapan magis-religius menjadi pendorong kekuasaan para raja, dan hingga sekarang pun masih hidup dalam benak warga. Kendati berupa benda mati, namun ia memiliki kesaktian dan kegunaan mencari keselamatan bagi raja atau siapapun yang memegangnya. Sebab itu, tidak heran apabila kita sering menjumpai orang modern yang berburu, merawat, memandikan, bahkan menyembah benda pusaka. Walau hidup di zaman modern, namun warisan kerajaan di masa lampau belum sepenuhnya sirna. Maka, jangan gampang menuding musrik dan klenik bagi mereka yang rutin ngumbuh keris dan merawat pusaka lainnya. ***

Heri Priyatmoko, Dosen Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta